

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki ciri khas yang unik dibandingkan daerah lain, yaitu tingginya angka kemiskinan di wilayah pedesaan meskipun provinsi ini dikenal sebagai daerah pendidikan dan pariwisata. Sebagian besar penduduk miskin bekerja di sektor informal, seperti pertanian dan perdagangan kecil, dengan pendapatan yang tidak menentu. Selain itu, kemiskinan di DIY sering kali bersifat struktural dan turun-temurun, dipengaruhi oleh akses yang terbatas terhadap layanan pendidikan dan kesehatan berkualitas, serta minimnya lapangan kerja yang layak di luar sektor informal.

1. Ketimpangan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi DIY. Ketidaksignifikanan ini disebabkan oleh variasi karakteristik ekonomi antar kabupaten/kota. Selain itu, ketimpangan di DIY disebabkan oleh dominasi sektor informal, rendahnya akses terhadap pekerjaan layak, dan ketimpangan kepemilikan aset.
2. Upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi DIY. Struktur ekonomi DIY yang didominasi sektor jasa, pendidikan, dan UMKM menyebabkan upah cenderung rendah.
3. TPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi DIY. Kota-kota seperti Yogyakarta dan Sleman, memiliki TPT yang tinggi disebabkan oleh mismatch antara lulusan dan lapangan kerja formal. Di

sisi lain, kabupaten seperti Kulonprogo dan Gunungkidul menunjukkan TPT rendah namun tetap miskin karena dominasi sektor informal berupah rendah.

4. Jumlah wisatawan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan kabupaten/kota Provinsi DIY. Ketidaksignifikanan ini disebabkan manfaat ekonomi pariwisata yang tidak merata, keterbatasan keterampilan dan akses modal masyarakat lokal, konsentrasi aktivitas wisata di lokasi tertentu, ketergantungan pada sektor non-pariwisata seperti pertanian berproduktivitas rendah, serta tingginya biaya hidup di kawasan wisata.

## **5.2. Saran**

### **1. Mengurangi Ketimpangan Pendapatan Melalui Intervensi Struktural**

Meskipun ketimpangan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan secara statistik, hal ini tidak berarti ketimpangan dapat diabaikan. Pemerintah DIY perlu mendorong pemerataan akses terhadap pekerjaan layak, terutama di wilayah-wilayah yang masih didominasi sektor informal. Program pelatihan vokasi, pemberdayaan UMKM, serta fasilitasi kepemilikan aset produktif di kabupaten dengan ekonomi tertinggal seperti Gunungkidul dan Kulonprogo dapat memperkecil ketimpangan struktural antar wilayah.

### **2. Penguatan Kebijakan Upah Minimum Disertai Penciptaan Lapangan Kerja Produktif**

Karena upah minimum terbukti berpengaruh signifikan dalam menurunkan kemiskinan, pemerintah DIY disarankan untuk tidak hanya menaikkan upah minimum secara nominal, tetapi juga memastikan bahwa kenaikan tersebut disertai penciptaan lapangan kerja berkualitas di sektor formal. Dukungan terhadap sektor

jasa dan UMKM yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar harus diarahkan pada peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha, agar peningkatan upah tidak membebani pengusaha kecil namun tetap meningkatkan kesejahteraan pekerja.

### **3. Mengatasi TPT Melalui Perbaikan Kualitas dan Relevansi Pendidikan**

Tingginya TPT di wilayah seperti Yogyakarta dan Sleman menunjukkan adanya mismatch antara lulusan dan kebutuhan pasar kerja. Oleh karena itu, perlu ada sinergi antara dunia pendidikan, industri, dan pemerintah daerah dalam merancang kurikulum berbasis kebutuhan lokal. Di sisi lain, untuk daerah dengan TPT rendah namun kemiskinan tinggi seperti Kulonprogo dan Gunungkidul, intervensi perlu difokuskan pada peningkatan kualitas pekerjaan dan pendapatan di sektor informal, seperti melalui sertifikasi keterampilan dan bantuan teknologi tepat guna bagi petani atau pelaku usaha kecil.

### **4. Kebijakan untuk Meningkatkan Dampak Pariwisata terhadap Pengentasan Kemiskinan**

Mendorong pemerataan manfaat pariwisata dengan mengembangkan destinasi baru di luar pusat wisata utama, meningkatkan keterampilan dan kewirausahaan masyarakat lokal melalui pelatihan, serta mempermudah akses modal dan dukungan bagi UMKM dapat meningkatkan dampak pariwisata terhadap kemiskinan. Selain itu, diversifikasi ekonomi agar masyarakat tidak terlalu bergantung pada sektor non-pariwisata yang berproduktivitas rendah dan pengendalian biaya hidup di kawasan wisata dapat membantu meningkatkan kesejahteraan lokal. Pemerintah juga perlu memfasilitasi kolaborasi antara pelaku

wisata, investor, dan masyarakat untuk memastikan keuntungan pariwisata lebih merata